

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budi Susilo, Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2 (2013)
- Agusalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia Bogor, Jakarta, 2007
- Anwar, F., et al. (2020). Kebijakan pengendalian tembakau dan implementasi kawasan tanpa rokok di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan*, 7(3).
- Dewi, R., et al. (2016). Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di tingkat daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2).
- Hakim, A. (2022). Kewenangan pemerintah dalam regulasi kesehatan publik. *Jurnal Kriminologi Nusantara*, 10(1).
- Hidayat, R. (2019). Tantangan implementasi kawasan tanpa rokok di daerah. *Jurnal Kebijakan Kesehatan*, 7(3).
- Ibrahim, Johnny, *Teori, Metode, dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Johnny Ibrahim, *Teori, Metode, dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Pantja Astawa, I Gde, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia* Alumni, Bandung, 2009
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif dalam Produk Tembakau bagi Kesehatan.
- Peter Mahmud Marzuki, Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2016). *Governance, politics, and the state*. Macmillan.

- Philipus M. Hajdon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. 10, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- Putri, D., & Santoso, A. (2022). Efektivitas pengawasan kawasan tanpa rokok di tingkat provinsi. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 5(1).
- Ramadhan, A., et al. (2025). Evaluasi kebijakan kawasan tanpa rokok pasca penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3).
- S.F Marbun, Hukum Administrasi Negara I, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2012
- S.F Marbun, Hukum Administrasi Negara I, FH UII Press, Yogyakarta, 2012
- Sari, M., & Putra, H. (2021). Strategi implementasi regulasi kawasan tanpa rokok. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(3).
- Setyawan, T. (2024). Peran kebijakan afirmatif dalam mendukung kawasan tanpa rokok. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(2).
- SF. Marbun, Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia, Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 2001
- SF. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2010
- Siti Utami Dewi et. al., Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Tahta Media, Sukoharjo, 2023
- Suryani, L., & Hidayat, N. (2018). Multi-level governance dalam penerapan kawasan tanpa rokok. *Jurnal Politik & Kebijakan Kesehatan*, 6(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Zed, M. (2004). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan

